

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor Pangan dan pertanian khususnya tanaman pangan merupakan ibu dari semua sektor, dan apabila dapat diselesaikan permasalahannya oleh negara maka dapat dipastikan negara hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Semua sektor dapat ditunda dan ditawar, karena pangan merupakan urusan esensial bagi kehidupan manusia. Upaya-upaya peningkatan produksi yang dilakukan dalam menjaga pangan hingga saat ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani, dengan menurunnya pendapatan petani terutama petani tanaman pangan selain itu juga tingginya harga pengelolaan yang semakin tinggi dan susah di dapat membuat petani menjerit di akibatkan hasil yang tidak sesuai dengan pengeluaran, hanya kerugian yang mereka dapat semata.

Akibat rendahnya pendapatan disektor tersebut, maka generasi milineal enggan untuk terjun kedunia pertanian, sehingga regenerasi petani tidak berjalan, disisi lain usia dan serapan tenaga kerja disektor ini cukup besar dan masih terbuka lebar. Dengan demikian, pengeluaran petani lebih tinggi ketimbang pendapatannya. Akibatnya, tingkat kesejahteraannya tergerus. Jika dilihat data pada periode Januari 2019 hingga saat ini, rata-rata nilai tukar petani per bulan ada di posisi 102,4. Dengan acuan itu, dari sisi wilayah, kesejahteraan petani yang berdomisili di 23 provinsi pada Juli tahun ini berada di bawah rata-rata petani nasional. Bahkan 12 provinsi di antaranya memiliki indeks nilai tukar di bawah 100. Hal ini berarti pendapatannya dari penjualan hasil pertanian tak mampu menutupi ongkos produksi dan konsumsi rumah tangga.

Dengan demikian, petani di 12 provinsi tersebut pada Juli, hanya memiliki tiga opsi untuk menutupi selisih tersebut: berutang, menarik tabungan atau menjual simpanan, dan menurunkan belanja *input* produksi atau mengurangi konsumsi rumah tangga. Petani dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, antara lain ada di Bali dan Sulawesi Tengah. Sebaliknya, petani paling sejahtera ada di Provinsi Riau dan Bengkulu. Kenaikan harga minyak sawit mentah menjadi salah satu penopang tingginya nilai tukar petani di kawasan ini. Dinamika harga yang diterima petani dari hasil penjualan produk pertanian merupakan persoalan klasik.

Tak pernah ada solusi, terutama ketika datang musim turun harga seperti saat panen tiba, sementara kebutuhan justru meningkat. Cita-cita dan tujuan akhir dari sebuah proses pembangunan adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, cukup sandang pangan, berkedaulatan dan sejahtera secara berkelanjutan.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja juga berpotensi membawa dampak negatif bagi kebijakan perbenihan di Indonesia. UU Cipta Kerja mempermudah ketentuan terkait pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (UU Hortikultura), terdapat ketentuan bahwa pemasukan benih ke dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.

Ketentuan ini dihapus dalam UU Cipta Kerja, dan jelas akan mengakibatkan terancamnya kedaulatan petani atas benih, karena upaya perlindungan terhadap petani ditingkat nasional semakin diminimalisir. Tidak hanya itu, hal tersebut juga akan semakin mempersulit keinginan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan 1000 desa mandiri benih yang ditargetkan sejak tahun 2014. Selain berdampak pada UU Hortikultura, kebijakan perbenihan di Indonesia juga akan terdampak dengan dihapusnya beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Di dalam UU PVT pada dasarnya terdapat ketentuan mengenai syarat yang ketat terkait perlindungan varietas tanaman, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat(2) dan ayat (4). Hanya saja ketentuan ini dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Dengan dihapuskannya ketentuan tersebut, maka hal ini akan membuat Varietas Transgenik atau *Genetic Modified Organism* (GMO) akan lebih mudah didaftarkan dan diedarkan di wilayah NKRI. Hal ini akan mengancam varietas lokal yang dibudidayakan petani.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang serius bagi tata niaga pertanian di Indonesia khususnya di Desa Pangempon. Sejak pertama kali dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia pada awal Maret 2020, situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan rendahnya serapan produk hasil pertanian, selain itu juga petani khususnya di Desa Pangempon mengalami penurunan hasil tani yang sangat drastis. Semua itu dikarenakan rendahnya harga jual hasil panen. Sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan

papan serta pendidikan di tambah lagi saat diberlakukannya kebijakan (PSBB) yang menghambat petani saat memanen dan menjual hasil panen, dengan sulitnya pemasaran tersebut maka petani di tekan serendah-rendahnya dengan hasil panen yang angat murah. Dengan jauh dari harapan dan biaya perawatan yang lebih banyak di bandingkan hasil jualnya maka petani merugi. Dengan merugi maka petani jauh dari kata sejahtera.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Pangempon Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

B. Pembatasan Masalah

Untuk mempertegas permasalahan dalam penelitian ini maka perlu pembatasan masalah sebagai berikut :

a. Dimensi Waktu

Penelitian dilakukan berdasarkan data tahun 2019-2022.

b. Dimensi Lokasi

Penelitian dilakukan di Desa Pangempon, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.

c. Dimensi Studi

Strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani Di Desa Pangempon, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Pangempon, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menjelaskan strategi pemerintah desa dalam mewujudkan Kesejahteraan Petani di Desa Pangempon, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

2. **Kegunaan penelitian**

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dilakukan agar berguna bagi pengembangan ilmu sosial pada umumnya,serta terkandung ilmu agama pada khususnya sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu Pemerintahan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat.

b. Kegunaan Praktis

Bagi Peneliti, hasil dan secara keseluruhan berguna bagi desa dalam melakuka Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Pangempon, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.